

REASONS FOR NORMALIZING DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN ISRAEL AND THE UNITED ARAB EMIRATES AND BAHRAIN THROUGH THE ABRAHAM ACCORD AGREEMENT

Name : Batari Kani Raras

Email : batarikanir@gmail.com

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research examines the reasons for the normalization of diplomatic relations between Israel and United Arab Emirates and Bahrain. The normalization of diplomatic relations was marked by the ratification of the Abraham Accord agreement as a form of the Israeli state's efforts to seek an alliance with Arab countries, namely the United Arab Emirates and Bahrain. This agreement was ratified by signing by Donald Trump as the President of the United States as well as the host, Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu, Minister of Foreign Affairs of the UAE Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan, Minister of Foreign Affairs of Bahrain Abdullatif Al-Zayani at the White House Washington DC on 15 September 2020 .

This study uses a qualitative method, with data collection techniques through literature study sourced from several books, journals, final assignments, documents and websites. This study uses the Regional Security Complex theory by Barry Buzan which defines that the state as a political actor will establish relations with other countries if they have the same security problems so that common interests and dependencies will be established between these countries. Iran is present as a threat to the Middle East region so that in this case Israel establishes its alliance with the United Arab Emirates and Bahrain as a safeguard in order to maintain regional security stability.

The results of this paper conclude that the normalization carried out by Israel with the United Arab Emirates and Bahrain through the Abraham Accord agreement is motivated by reasons: Deterring the threat of Iranian power, Becoming a partner in military cooperation, and Optimizing economic cooperation.

Keyword: Abraham Accords, Middle East Stabilization, Normalization, Regional Security Complex

PENDAHULUAN

UEA didirikan 23 tahun setelah kemerdekaan Israel. UEA tidak pernah mengambil bagian dalam perang melawan Israel, akan tetapi kebijakan dan sikapnya mencerminkan ketidaksepahaman serta perlawanan terhadap Israel. Untuk memahami sifat hubungan UEA-Israel, maka penting untuk melihatnya dari sisi kondisi geopolitik kedua negara tersebut. UEA secara geografis jauh dari Israel, terletak di pantai selatan Teluk Persia. Dengan kondisi yang berjauhan, maka kemungkinan terjadinya konflik di antara mereka menjadi kecil. UEA adalah negara monarki dengan mayoritas warga aslinya Arab Sunni namun setengah populasi negara ini adalah ekspatriat dari berbagai bangsa. Sementara itu, Israel menggunakan sistem demokrasi, masyarakatnya mayoritas Yahudi dari berbagai bangsa dan ada minoritas Arab Sunni (orang Palestina yang tinggal di wilayah yang dikuasai Israel).¹

Begitu pula dengan Bahrain. Negara ini juga tidak pernah mengalami konflik secara langsung dengan Israel namun sama dengan negara-negara Arab lainnya, Bahrain pun tidak menyetujui sikap Israel terhadap Palestina. Menteri Dalam Negeri Bahrain, Rashid bin Abdullah Al Khalifa menegaskan, normalisasi dengan Israel ini semata-mata dilakukan untuk melindungi kepentingan negara. Dia juga

mengatakan, kesepakatan normalisasi dapat melindungi entitas Bahrain.²

Pengesahan perjanjian *Abraham Accord* merupakan bentuk upaya negara Israel untuk membuka hubungan diplomatiknya secara resmi dengan negara Arab yaitu UEA dan Bahrain. Penandatanganan ini dilakukan secara resmi dan terbuka di Gedung Putih Washington DC Amerika Serikat.

Awalnya pada Agustus 13 2020, Uni Emirat Arab menyatakan secara resmi telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebulan kemudian tepatnya pada 15 September Bahrain menyusul UEA untuk memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan Israel. Sehingga pada akhirnya proses normalisasi ini dilakukan secara resmi dengan ditandatanganinya perjanjian yang bernama *Abraham Accord*.³

Abraham Accord disahkan dan ditandatangani oleh Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif al-Zayani, dan Menteri Luar Negeri UEA Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan di Gedung Putih Washington DC pada 15 September 2020. Hal ini tentunya merupakan sejarah baru bagi kawasan Timur Tengah dan menjadi

¹ Rabi, U. & Mueller, C. (2017), "*The Gulf Arab States and Israel since 1967: From 'No Negotiation' to Tacit Cooperation*", *British Journal of Middle East Studies*, 44(4), 576592.

² Anadolu Agency, "*Bahrain in the context of normalization with Israel*", melalui <https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-bahrain-in-the-context-of-normalization-with-israel/1955293> (diakses pada 28 Februari 2021)

³ US Department of State, "*The Abraham Accords*", melalui <https://www.state.gov/the-abraham-accords/> (diakses pada 28 Desember 2020)

bukti keberhasilan diplomasi antara UEA, Bahrain dan Israel.⁴

Isi dari perjanjian *Abraham Accord* ini meliputi:⁵

1. Membangun hubungan bilateral ekonomi dan membuka hubungan diplomatic secara penuh atau “normalisasi”. Meliputi investasi, keamanan, pariwisata, penerbangan langsung dan beberapa kerjasama lainnya.
2. Israel, UEA, Bahrain, dan Amerika Serikat ingin mengimplementasikan agenda strategis untuk kawasan Timur Tengah dengan tujuan memperluas kerjasama ekonomi, keamanan dan hubungan diplomatic.
3. Israel akan menunda rencananya untuk melakukan ekspansi di wilayah Palestina bagian Tepi barat untuk focus pada normalisasi ini.
4. Hak bagi warga UEA dan Bahrain untuk mengunjungi dan beribadah di Masjid Al-Aqsa Yerusalem Timur.

Amerika Serikat yang berperan sebagai mediasi dalam perjanjian ini memang sedari awal

memiliki hubungan baik dengan negara Israel. Donald Trump selaku presiden Amerika Serikat sendiri mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Pada 13 Agustus 2020 di Gedung Putih, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Normalisasi hubungan diplomatic ini merupakan upaya untuk mempertemukan tiga mitra regional AS. Melalui Normalisasi ini, AS bercita-cita dalam mempromosikan stabilitas melalui kerjasama diplomatik, peningkatan kerjasama ekonomi, dan koordinasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan.⁶

Sebagai imbalan dalam terwujudnya normalisasi ini, Amerika menyetujui penjualan 50 jet Lockheed Martin Co F-35 ke Uni Emirat Arab seharga US\$ 10 Miliar. Mike Pompeo selaku Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa penjualan jet tersebut merupakan bagian dari normalisasi antara negara tersebut demi memperkuat pertahanan militer. Donald Trump selaku presiden pada saat itu juga menyatakan kepada *The Times of Israel* bahwa kesepakatan penjualan senjata tersebut merupakan bagian besar dari kesepakatan normalisasi.⁷

⁴ US Embassy in Israel, “*Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates*”, August 2020, melalui <http://il.usembassy.gov/joint-statement-of-the-united-states-the-state-of-israel-and-the-united-arab-emirates/> (diakses pada 24 November 2020)

⁵ Haaretz, “*Historic Diplomatic Breakthrough*”, melalui <https://www.haaretz.com/israel-news/historic-diplomatic-breakthrough-read-the-full-statement-on-israel-uae-agreement-1.9070792> (diakses pada 21 Januari 2021)

⁶ The National News, “*Joint statement of US, Israel and UAE*”, melalui <https://www.thenationalnews.com/world/gcc/full-text-joint-statement-of-us-israel-and-uae-1.1063399> (diakses pada 21 Januari 2021)

⁷ Sindo News, “*Pompeo Akui Jet Tempur Siluman F-35 di Balik Normalisasi UEA-Israel*”, melalui <https://international.sindonews.com/read/452306/43/pompeo-akui-jet-tempur-siluman-f-35-di-balik-normalisasi-uea-israel-1623373568> (diakses pada 20 Agustus 2021)

KERANGKA TEORI

Perspektif: Realisme

Perspektif yang digunakan untuk penelitian ini adalah **Realisme**. Konsep sistem internasional yang anarki yang dibawakan oleh Thomas Hobbes relevan dengan penelitian ini. Realisme mengklaim dapat menjelaskan realitas politik internasional. Perspektif ini menekankan pada politik yang dihasilkan dari sifat egois manusia di atas negara. Bagi para realis, tujuan tertinggi adalah kelangsungan hidup negara dan bagaimana tindakan negara untuk meraih kekuasaannya.⁸

Realis berfokus pada peran negara dalam analisis internasional dan mengabaikan pengaruh aktor non-negara. Realis menekankan sifat anarkis dari sistem internasional. Realisme berpendapat bahwa hanya kekuasaan yang dapat memastikan kelangsungan hidup suatu negara dalam sistem internasional. Realis setuju bahwa negara hanya dapat memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri melalui strategi yang memungkinkan mereka untuk membela diri dan kepentingan mereka terhadap agresi negara lain.⁹

Pada bukunya yang berjudul *Leviathan*, Hobbes berpendapat bahwa manusia secara alamiah itu memiliki persamaan antara satu dengan lainnya yaitu memiliki hasrat akan kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, dan kehormatan serta menolak untuk hidup sengsara dan mati, hal ini lah yang menggerakkan manusia dalam mengambil tindakan.

Hobbes menegaskan kembali bahwa hasrat manusia itu tidak terbatas, sehingga untuk memenuhinya manusia menggunakan power-nya masing-masing, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya benturan power antarsesama manusia.¹⁰

Hobbes, seperti kebanyakan realis menekankan bahwa sifat alamiah manusia selalu berdasarkan anarki dan egoisme demi kepentingan dirinya. Hierarki pada tatanan politik semakin memicu timbulnya sifat anarki dari suatu negara tersebut demi mencapai kekuasaan dan kemenangan. Menurut Hobbes sifat anarki ini diperkirakan akan terus bertahan pada suatu negara bahkan tanpa mempertimbangkan resiko yang akan diterima. Hobbes kembali menegaskan bahwa power atau kekuatan negara dapat mengakibatkan kerusakan.¹¹

Teori: *Regional Security Complex*

Barry Buzan mendefinisikan bahwa *Regional Security Complex* merupakan teori yang memfokuskan kepada keamanan regional/kawasan dalam menjalani dinamika politik internasional demi menjaga stabilitas keamanan kawasan. Dalam teori ini, region/kawasan dipandang sebagai sebuah sistem dalam hubungan yang signifikan didasarkan oleh kedekatan secara geografis. Pada teori ini, negara-negara tersebut menjalin hubungan berdasarkan rasa saling bergantung satu sama lain dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan

⁸ Stephen Mcglinchey, Rosie Walters & Christian Scheinflug, *International Relations Theory* (Bristol, England : E-International Relations, 2017), hal 21.

⁹ M. Cox & R. Campanaro, *Introduction To International Relations* (University of London, 2016), hal 105.

¹⁰ Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional: Perspektif – Perspektif Klasik*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2016) hal 39.

¹¹ Scott Burchill, Andrew Linklater, *Theories of International Relations* (New York: Deakin University 1995, 1996) hal 32.

kawasan sehingga teori ini menganggap bahwa rasa ketergantungan inilah yang akan menjadikan hubungan antar negara tersebut menjadi lebih intens.

Terdapat dua faktor dalam terjalannya hubungan antar negara menurut teori ini yaitu *Amity* dan *Enmity*. *Amity* diartikan sebagai persahabatan yaitu negara-negara yang menjalani hubungan berdasarkan unsur persahabatan dalam hal saling menjaga hubungan baik, saling menjalin kerjasama sehingga diharapkan kepada saling memberi perlindungan dan dukungan dalam konteks keamanan. *Enmity* diartikan sebagai permusuhan yaitu pola hubungan yang terbentuk antara negara-negara dalam kawasan yang dilatar belakangi oleh rasa saling terancam dan saling mencurigai dalam konteks keamanan.

Barry Buzan menganalisis terkait isu keamanan regional dan bagaimana pengaruhnya terhadap konsep keamanan secara keseluruhan, Buzan menawarkan beberapa konsep yang menarik dan penting. Isu-isu yang dapat mempengaruhi ini mencakup hal-hal seperti ideologi, wilayah, garis etnis, dan historis. Ini penting untuk dipahami karena konsep persahabatan/permusuhan negara mengarah pada tentang apa yang disebut Buzan sebagai "kompleks keamanan" yang merupakan "sekelompok negara yang masalah keamanan utamanya saling terkait."¹²

Konsep keamanan regional dapat berguna dalam hal membuat kebijakan dan juga dalam menjalani

kerjasama yang baik untuk membahas isu-isu yang krusial di satu wilayah. Jika solusi dapat ditemukan hanya dari dalam konteks yang kompleks, maka kebijakan harus dibuat dari dalam konteks ini juga.

Jika mengaitkan masalah keamanan wilayah Israel dan Timur Tengah, dapat dilihat dengan jelas bagaimana keamanan Israel terikat dengan kompleks regionalnya di Timur Tengah dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan fakta bahwa keamanan regional adalah bagian dari hierarki masalah keamanan dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Konsekuensi dari tidak mempertimbangkan keamanan regional bisa menjadi bencana untuk setiap negara bagian yang tidak memperhatikannya.

Konsep: Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan hal yang menjadi acuan negara dalam bertindak. Pada definisi sistem politik internasional, tindakan yang diambil oleh negara sebagai aktor harus mempertimbangkan kepentingan apa yang ingin didapatkan dari aktor politik lainnya. Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang selalu dipergunakan dalam studi hubungan internasional dan politik internasional.

Negara merupakan kekuatan tertinggi di masyarakat sehingga sifat anarkis dalam politik internasional hanya bisa ditangani oleh negara. Negara sebagai aktor utama memiliki kedaulatan untuk mengambil keputusan demi kepentingannya. Oleh karena itu, "kepentingan nasional" tak lain ialah "kepentingan

¹² Barry Buzan, *"People, States and Fear"*, (Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1991 and 2008 with a new preface from the author) hal 187.

negara” yang berlandaskan dari kekuasaan yang dimiliki.¹³

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional yang dianggap relevan dengan pembahasan tentang normalisasi yang dilakukan Israel, UEA, dan Bahrain. Normalisasi hubungan diplomatic yang dilakukan secara resmi oleh ketiga negara tersebut tentunya berlandaskan oleh kepentingan nasional masing-masing negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif ini meliputi penjelasan atau pemaparan informasi dalam objek yang akan dihubungkan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dihimpun melalui data sekunder dan informasi – informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini juga meliputi kajian pustaka seperti, buku, jurnal, surat kabar dan internet. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan perilaku aktor-aktor internasional dengan menghubungkan sebab akibat yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika hubungan Israel dengan Negara-negara Arab

Pada mulanya konflik ini hanya terjadi antara masyarakat Arab yang mempertahankan wilayah Palestina dari Israel hingga seiring berjalannya waktu konflik ini melebar antara Israel dan negara-negara Arab yang membela

¹³ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (New York: Deakin University, 2005) hal 35.

kedaulatan wilayah Palestina dan semakin mencuat ketika PBB mengeluarkan resolusi pemisahan wilayah Palestina-Israel pada tahun 1947 dan membentuk negara Israel sebagai negara berdaulat pada tahun 1948, resolusi tentu saja dikecam dan ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab.¹⁴

Diawali dengan diaspora yahudi yang sedang mencari wilayah untuk dijadikan tempat tinggal tetap untuk menyelamatkan pembantaian yang dilakukan terhadap kaum yahudi. Pencarian tanah air ini diberi julukan “*Promised Land*” untuk mewujudkan cita-cita warga Yahudi yang ingin memiliki wilayah tetap dan pencarian ini dilakukan sejak 1897. Sebelum menetapkan Palestina sebagai “*Promised Land*” bagi mereka, panjang proses dan banyak wilayah yang dilalui oleh kaum Yahudi mulai dari Amerika Selatan, Afrika sampai pada akhirnya berujung ke Palestina.¹⁵

Migrasi besar-besaran yang dilakukan kaum Yahudi ini makin dipermudah ketika wilayah Palestina ditaklukkan oleh Inggris dari Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1917-1918 dan Inggris menduduki pemerintahan wilayah Palestina selama 30 tahun dengan mandat Liga Bangsa Bangsa pada tahun 1922. Pada 1917 Inggris mengeluarkan Deklarasi *Balfour* yang berisi legitimasi bagi kaum Yahudi atas kepemilikan utuh terhadap wilayah Palestina yang pada

¹⁴ Jerome Slater, “*What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process*”, (*Political Science Quarterly*, 2001) hal. 171-172

¹⁵ Azra Azyumardi, “*Konflik Baru Antar Peradaban, Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persanda, 2002)

mulanya merupakan tanah air warga Arab Palestina.¹⁶

Setelah berakhirnya mandat Liga Bangsa Bangsa terhadap masa pemerintahan Inggris di wilayah Palestina pada 14 Mei 1948 Israel mendeklarasikan kemerdekaannya terhadap wilayah Palestina sehingga hal tersebut menjadi pemicu mulanya terjadi perang Negara Arab terhadap Israel sehari setelah dideklarasikan kemerdekaan tersebut dengan serangan yang datang dari militer Mesir, Yordania, Lebanon, Irak, Mesir, Suriah dan militer Arab lainnya. Akhir dari perang ini dimenangkan oleh Israel dengan kesepakatan dengan PBB sehingga Israel mendapatkan 70% dari wilayah Palestina yang diinginkan Yahudi Israel. Negara-negara Arab sepenuhnya mendukung Palestina atas wilayah yang sejak dahulu telah mereka duduki karena migrasi besar-besaran kaum Yahudi ke Palestina dari Eropa Timur dan Tengah menyebabkan hal ini menjadi ancaman bagi negara-negara Arab terhadap kepunahan warga asli Arab dari tanah air mereka dan ketakutan tanah air mereka menjadi negara Yahudi.¹⁷

Pada 22 Maret 1945 berdiri sebuah organisasi regional yang bertujuan untuk mewakili kepentingan orang-orang Arab

16 Michael J Cohen, *"Britain's Moment in Palestine: Retrospect and Perspectives, 1917-1948"*, (Israeli History, Politics and Society, 2014) hal 146

17 Wong A, *"Jejak Konflik Israel-Arab hingga Berujung Aksi Normalisasi"*, melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200916163507-120-547305/jejak-konflik-israel-arab-hingga-berujung-aksi-normalisasi> (diakses pada 8 Januari 2022)

organisasi ini dinamai Liga Arab dan sebagian besar negara-negara Arab bergabung dalam organisasi ini. Organisasi ini berdiri dengan tujuan menentang ekspansi colonial setelah Perang Dunia II juga sebagai perjuangan melawan Yahudi yang merebut wilayah Palestina, berperan aktif dalam mempererat hubungan antar negara-negara Arab dan sebagian kawasan Afrika dan agar terciptanya kerjasama antar negara kawasan dalam bidang politik, militer dan ekonomi.¹⁸

Liga Arab juga telah mengeluarkan resolusi untuk boikot Israel yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya lalu pada tahun 1951 Dewan Liga Arab kembali mengeluarkan resolusi no 367 untuk mendirikan kantor boikot pusat di Damaskus, Suriah.¹⁹

Terdapat tiga bentuk dasar boikot yang diimplementasikan Liga Arab:²⁰

1. *Primary Boycott*, yaitu melarang negara-negara Arab baik negara maupun individu untuk tidak sama sekali berdagang dengan Israel baik terhadap negara maupun warganya. Larangan ini dianjurkan bagi warga negaranya sendiri dan perusahaan asing yang berdomisili di wilayah

¹⁸ Asgar Bixby, *"Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia"*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1993) hal 22

¹⁹ Habib Al Mulla, Borys Dackiw & Samir Safar, *"With New Decree, UAE Abolishes Israel Boycott Law Following the Historic UEA-Israel Peace Deal,"* Middle East Insight, melalui <https://meinsights.bakermckenzie.com/2020/09/03/with-new-decree-uae-abolishes-israel-boycott-law-followingthe-historic-uae-israel-peace-deal/> (diakses pada 8 Januari 2022)

²⁰ Nancy Truck, *"The Arab Boycott of Israel,"* (Foreign Affairs 55 no 3, Council on Foreign Relations, April 1977) hal. 473-474

Arab untuk melakukan ekspor produk-produk yang diproduksi di negara Arab serta larangan terhadap pengiriman produk ke Israel melalui negara Arab.

2. *Secondary Boycott*, yaitu menolak keras bagi negara-negara Arab untuk berdagang dengan pihak ketiga yang terikat kerjasama dengan Israel, yang dianggap berkontribusi langsung terhadap Israel baik meskipun warga negara non-Israel atau perusahaan non-Israel. Dalam boikot ini digunakan *Blacklist* sebagai instrument utama, sehingga negara-negara Arab yang menyetujui boikot ini tidak boleh sama sekali berurusan dan atau menggunakan barang dari perusahaan yang masuk dalam *blacklist*. Kategori masuk *blacklist* jika ditemukan hal seperti:

- Memiliki cabang atau perusahaan utama di Israel
- Memiliki pabrik perakitan di Israel, termasuk perusahaan asing yang melakukan perakitan produknya di Israel
- Memiliki badan umum atau kantor utama di Israel untuk operasi Timur Tengah
- Telah memberikan lisensi manufaktur perusahaan ataupun hak untuk menggunakan nama mereka kepada Israel
- Menjadi mitra di perusahaan atau pabrik Israel
- Memberikan saran dan keahlian teknis untuk pabrik Israel
- Menjadi agen perusahaan Israel atau importir utama produk Israel
- Mencari sumber daya alam di Israel
- Menolak saat periode peringatan untuk menjawab pertanyaan dari Kantor Boikot Pusat untuk mengklarifikasi posisi perusahaan dan menentukan hubungannya dengan Israel

3. *Tertiary Boycott*, yaitu boikot yang mencegah untuk melakukan kontribusi tidak langsung oleh negara Arab terhadap ekonomi Israel. Secara penerapannya boikot ini paling jarang dilakukan dan diterapkan. Penerapan boikot ini ditemukan dalam kontrak proyek besar, dimana hal tersebut hanya bagian dari bisnis yang berlangsung antara Amerika Serikat dan Timur Tengah.

Iran Sebagai Ancaman

Regional Security Complex Theory oleh Barry Buzan mendefinisikan secara teoritis bahwa hubungan antar negara didasarkan oleh *Amity* (Persahabatan) dan *Enmity* (Permusuhan). *Amity* yang diartikan dengan terikatnya hubungan antar negara didasari oleh persahabatan dengan harapan bahwa akan adanya kerjasama, kepentingan atau perlindungan antar satu sama lain. Sebaliknya, *Enmity* memiliki arti bahwa hubungan antar negara yang terjalin atas dasar kecurigaan dan ketakutan satu sama lain.²¹

Dengan ditandatanganinya *Abraham Accords* oleh Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain menandakan terjadinya *amity* ditandai dengan beberapa poin dalam perjanjian tersebut yang menandai akan terjadinya kerjasama dalam berbagai bidang. Pola *Enmity* juga terjadi dalam hal ini dengan Iran yang hadir sebagai tokoh antagonis yang dicurigai dan ditakuti oleh 3 negara tersebut.

Republik Islam Iran muncul sebagai ancaman utama yang besar bagi negara-negara Arab sekitar

²¹ Barry Buzan, "People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. 2nd edition" (London: Harvester Wheatsheaf) hal 190

sehingga UEA dan Bahrain demi menjaga keamanan nasionalnya dari kekuatan Iran yang terus meningkat serta menghindari ekstremisme ajaran Syiah Iran menjadikan normalisasi ini sebagai langkah pertama bagi perlindungan dari Iran. Negara-negara anggota Dewan Keamanan Teluk atau GCC mengubah prioritas utama mereka berdasarkan realita yang terjadi pada politik dan keamanan Timur Tengah. Mereka menyetujui bahwa Iran merupakan ancaman baru di kawasan Teluk. Sehingga teror yang disebabkan Iran lah dianggap menjadi salah satu faktor terbentuknya aliansi baru di kawasan Timur Tengah terdiri dari Israel, UEA, Bahrain dengan dukungan Amerika Serikat.²²

Kepemilikan nuklir oleh Iran juga menjadi ketakutan dan kecurigaan oleh negara sekitar terutama Israel, UEA dan Bahrain karena dapat mengancam keberadaan penduduk dengan daya ledak yang begitu besar. Namun dalam hal ini Iran yang berambisi untuk memiliki nuklir memiliki alasan untuk mendapatkan rasa aman serta menunjukkan kekuatan dan mendapat hormat dari negara-negara atau dalam istilah keamanan disebut dengan “*deterrence*”. Lalu alasan lainnya atas kepemilikan nuklir adalah bertujuan untuk kebutuhan akan energi yang semakin meningkat sehingga energi nuklir dirasa sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sumber daya listrik negara-negara berkembang khususnya yang sedang melakukan

²² Huma Baqai & Sabiha Mehreen, “*Abraham Accords: A Journey From Arab-Israeli to Palestinian-Israeli Conflict*,” (JISR-MMSE 2021 Vol 19 No 1), hal 118

produksi masif. Karena apabila suatu negara telah memasuki fase industrialisasi, maka adalah hal yang wajar untuk mencari sumber daya listrik yang besar.²³

Dalam hal ini PBB sebagai lembaga internasional yang punya pengaruh dalam politik internasional telah menghimbau agar negara-negara di dunia ini mengutamakan perdamaian di atas segalanya lalu menganjurkan negara-negara untuk terlibat dalam perjanjian non-proliferasi nuklir atau *Non-Proliferation Treaty* (NPT). Ketika negara telah berkomitmen dalam perjanjian ini diwajibkan untuk memberi transparansi proses dalam menjalani aktifitas riset dan pengembangan nuklir di negara tersebut dengan memberi akses kepada IAEA (International Atomic Energy Agency). Meskipun Iran bergabung dalam perjanjian tersebut namun sikap yang ditunjukkan Iran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan IAEA sebagai pengawas Iran telah melampaui batas dengan mulai menciptakan nuklir sebagai senjata.²⁴

Israel tetap teguh dengan narasi yang selalu disuarakannya pada forum-forum Sidang Umum PBB dengan menyatakan bahwa kepemilikan nuklir oleh Iran ini tidak bisa dianggap sepele karena selain mengancam negara-negara kawasan Timur Tengah hal ini juga

²³ Ariel Levite, “*Deciphering Iran’s Nuclear Strategy*”, melalui <https://carnegieendowment.org/2021/09/10/deciphering-iran-s-nuclear-strategy-pub-85313> (diakses pada 12 Januari 2023)

²⁴ Kelsey Davenport, “*IAEA Investigations of Iran’s Nuclear Activities*” melalui <https://www.armscontrol.org/factsheets/iaea-investigations-irans-nuclear-activities> (diakses pada 12 Januari 2023)

merupakan ancaman dunia internasional karena dikhawatirkan sewaktu-waktu Iran bisa memicu atau bahkan menyebabkan perang nuklir secara terang-terangan.²⁵

Penandatanganan *Abraham Accord* Sebagai Bentuk Komitmen Menjalani Hubungan Diplomatik Secara Terbuka

Negara-negara teluk tampaknya menjadi realistis dalam menyusun kebijakan demi kepentingan nasional masing-masing negara. *Abraham Accord* menjadi bukti atas rasionalitas UEA dan Bahrain. Normalisasi yang terjadi antara UEA dan Bahrain terhadap Israel menjadi suatu hal baru yang mengubah sejarah di wilayah Timur Tengah sehingga dengan terjadinya normalisasi ini dapat menjadi jalan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah.

Meskipun memiliki hubungan yang pasif namun Israel dengan Uni Emirat Arab diketahui telah memiliki hubungan terselubung sejak lama. Beberapa tahun sebelum 2020 telah ada gagasan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik secara resmi. Terhubungnya Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed melalui telepon pada 13 Agustus yang pada akhirnya menyebabkan tercetusnya keputusan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik secara resmi antara mereka. Lalu disusul oleh Bahrain pada 11 September yang menyatakan

dan menyetujui untuk ikut serta dalam perjanjian normalisasi ini.²⁶

Pada perjanjian *Abraham Accords* ini melibatkan Amerika sebagai pihak mediasi dengan menjadikan White House sebagai tempat penandatanganan ini. Pada hal ini Donald Trump sebagai presiden yang masih menjabat pada saat itu dengan slogannya *America First* mengutamakan kepentingan Amerika dalam membentuk kebijakan luar negerinya. Pada masa kepemimpinan Trump, dalam urusan luar negeri Amerika terlihat berpihak ke Israel sebagai sekutunya dengan mengakui kedaulatan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, menghentikan bantuan dana untuk palestina, keluar dari perjanjian nuklir Iran dan merealisasikan normalisasi hubungan antara Israel dengan UEA dan Bahrain yang tentu saja hal-hal tersebut menguntungkan Israel dan bisa dinilai bahwa itu semua dilakukan Trump demi menjaga kepentingan Amerika dengan Israel sebagai sekutunya.²⁷

Tidak dapat dipungkiri, keputusan untuk melakukan normalisasi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan Trump sebagai bentuk kampanye menjelang pemilihan presiden Amerika pada akhir 2020. Dengan direalisasinya perjanjian normalisasi pada

²⁵ Steve Holland, “*Israel sign joint pledge to deny Iran nuclear weaponry*” melalui <https://www.reuters.com/world/us-israel-sign-joint-pledge-denying-nuclear-weapon-iran-2022-07-14/> (diakses pada 5 Desember 2022)

²⁶ Lisa Barrington, “*UAE-Israel phone lines open to normalize ties*”, melalui <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-telecoms-idUSKCN25C0DB> (diakses pada 5 Desember 2022)

²⁷ Victor, Simela M., “Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel dan Isu Palestina”, (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 2020, Vol. 12, No.17). hal 8

pemerintahan Trump menjadi harapan baginya untuk mendapat citra baik agar dipilih kembali menjabat pada periode selanjutnya. Kebijakan untuk meinginisasi normalisasi ini digunakannya untuk mendapat dukungan pemilih di Amerika Serikat bagi mereka yang mendukung kebijakan Amerika terhadap Timur Tengah. Sebagai presiden Amerika yang popularitas dan citranya menurun hal ini dilakukan dalam rangka menarik dukungan sebanyak-banyaknya.

Donald J.Trump sebagai salah satu penggagas ide normalisasi negara-negara Timur Tengah menepati janjinya terhadap UEA untuk menjual jet tempur F-35 yang ternyata menurut penuturan pejabat UEA sebenarnya Abu Dhabi sudah tertarik untuk berhasil membeli pesawat ini sejak 2014. Trump menepati janjinya, Januari 2021 sehari sebelum Joe Biden Presiden Amerika Serikat baru dilantik akhirnya Abu Dhabi berhasil mendapat persetujuan Trump sehingga ditandatangani perjanjian senilai \$23 miliar untuk membeli 50 jet tempur F-35, 18 drone *Reaper*, serta beberapa amunisi canggih lainnya.²⁸

Terkait dengan terjadinya normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain hal ini tentu saja mendapatkan banyak respon yang berbeda dari tiap sudut pandang negara-negara lain. Negara-negara yang merespon baik kesepakatan ini meliputi Mesir, Yordania, Sudan, Inggris, Prancis dan Kanada serta

²⁸ The Arab Gulf States Institute in Washington, "*Turbulent Skies for Gulf F-35 Deals*", melalui <https://agsiw.org/turbulent-skies-for-gulf-f-35-deals/> (diakses pada 5 Juni 2022)

terdapat juga kritikan dari beberapa negara terkait kesepakatan ini seperti Oman, Qatar, Iran dan Turki serta terjadinya demonstrasi oleh beberapa kelompok warga sipil, aktivis, dan akademisi yang mengecam perdamaian terhadap Israel.²⁹

Mohammed Javad Zarif sebagai Menteri Luar Negeri Iran mengungkapkan kekecewaannya terhadap UEA dan Bahrain yang telah secara resmi menyatakan hubungan terbuka secara diplomatik, ia bahkan menyebut bahwa apa yang dilakukan UEA dan Bahrain ini menandakan mereka telah menjadi mitra kejahatan Israel serta mengancam keamanan kawasan dan menghianati dunia Islam. Presiden Iran juga menyatakan jika kesepakatan yang terjadi ini bertujuan untuk Israel memperluas wilayahnya di tanah Arab maka Iran tidak akan segan-segan untuk menindaklanjuti dari cara yang jauh berbeda dari sebelumnya. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran juga merespon hal ini dengan memberi peringatan bahwa jika terjadi sesuatu di kawasan Teluk serta mengancam keamanan nasional Iran walau hanya sedikit saja, maka Iran tidak akan mentorelir hal tersebut dan akan menyalahkan UEA serta Bahrain.³⁰

²⁹ Reuters, "*Egypt's Sisi welcomes UAE-Israel deal, halt to annexation of Palestinian lands*" melalui <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-egypt-idUSKCN2592SX> (diakses pada 15 Januari 2022)

³⁰ BBC, "*Agreement between Israel and the UAE ;Major General Bagheri: We will not tolerate Iran's national security being compromised*" melalui <https://www.bbc.com/persian/iran-53797243> (diakses pada 20 Januari 2022)

Bagi Palestina, normalisasi yang terjadi antara UEA dan Bahrain ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap mereka dan terhadap wilayah Palestina yang awalnya diperjuangkan negara-negara Arab. Mahmoud Abbas selaku Presiden Otoritas Palestina menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan bukti gagalnya strategi dalam menghadapi dan melawan Israel di Timur Tengah. Setelah terjadinya kesepakatan ini Palestina mengajukan kepada Liga Arab untuk membuat rancangan pembatalan kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan UEA serta Bahrain. Namun, negara-negara Liga Arab menolak permintaan Palestina dengan alasan mereka sepakat agar lebih berfokus pada kesepakatan akhir komitmen *Arab Peace Initiative 2002*, solusi dua negara serta *land-for-peace-principle*. Kecewa dengan penolakan tersebut, Palestina merespon dengan melepaskan haknya sebagai Presiden Liga Arab pada 22 September 2020 sebagai bentuk protes serta kekecewaannya terhadap negara yang melakukan normalisasi dengan Israel.³¹

Peresmian Kedutaan Besar Antara Israel Dengan UEA-Bahrain

Terlepas dari isu keamanan Timur Tengah yang menjadi urgensi utama tercapainya normalisasi, bidang politik tentunya menjadi hal juga krusial dalam perjanjian ini. Konflik Israel-Palestina yang telah terjadi sejak lama menyebabkan

³¹ Rossi Handayani, "Palestina Pilih Mundur dari Kepresidenan Liga Arab", melalui <https://www.republika.co.id/berita/qh3aw1430/palestina-pilih-mundur-dari-kepresidenan-liga-arab> (diakses pada 20 Januari 2022)

buruknya pandangan terhadap Israel sehingga tidak ada satu pun negara Arab yang mau beraliansi dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara ini. Namun dengan mulainya berubah prioritas utama negara-negara Arab, mereka melihat Israel memiliki daya tawar yang menarik sehingga terjalannya hubungan diplomatis dinilai dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan saling mengakui kedaulatan satu sama lain dan membuka kantor kedutaan antara masing-masing mereka, maka normalisasi antara Israel, Uni Emirat Arab dan Bahrain dinilai sangat menguntungkan di bidang diplomasi tradisional kawasan Timur Tengah.³²

Pada 29 Juni 2021, telah resmi dibukanya kantor kedutaan besar Israel di Uni Emirat Arab, Abu Dhabi. Peresmian kantor kedutaan ini terjadi 9 bulan setelah terjadinya normalisasi. Yair Lapid selaku Menteri Luar Negeri Israel yang hadir dalam peresmian kantor kedutaan ini.³³ Pada 14 Juli 2021, giliran Uni Emirat Arab yang membuka secara resmi kantor kedutaan besar di Israel, Tel Aviv sekaligus menjadikan UEA sebagai negara Teluk pertama yang membuka kantor kedutaan di Israel. Duta Besar UEA untuk Israel mengungkapkan bahwa kedua negara

³² Suci Sekarwati, "Kaleidoskop 2020: Ramai-ramai Normalisasi Hubungan Israel" melalui <https://dunia.tempo.co/read/1415163/kaleidoskop-2020-ramai-ramai-normalisasi-hubungan-israel> (diakses pada 9 Juni 2022)

³³ VOA Indonesia, "Israel Resmi Buka Kedutaan Besar di Uni Emirat Arab", melalui <https://www.voaindonesia.com/a/israel-resmi-buka-kedutaan-besar-di-uni-emirat-arab/5947310.html> (diakses pada 9 Juni 2022)

ini sudah menandatangani beberapa kesepakatan di berbagai bidang seperti ekonomi, perjalanan udara, teknologi dan budaya. Presiden Israel menyatakan bahwa pembukaan kantor Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di Israel ini merupakan terobosan baru bagi kedua negara ini menuju masa depan yang makmur dan aman di Timur Tengah.³⁴

Pada 30 September 2021, Israel resmi membuka kedutaan besar Israel di Ibukota Bahrain, Manama dan peresmian ini juga dihadiri langsung oleh Yair Lapid selaku Menteri Luar Negeri Israel serta menjadi kunjungan tingkat tinggi yang pertama kali dilakukan pejabat Israel ke Bahrain sejak terjadinya normalisasi antara negara ini. Kementerian Luar Negeri Israel yang diwakilkan oleh Juru bicara menyatakan bahwa kunjungan Lapid ke Manama juga bertujuan untuk menandatangani MOU (*memorandum of understanding*) serta mengadakan pertemuan langsung dengan Menlu Bahrain. Beberapa poin dalam MOU meliputi perjanjian kerjasama dalam bidang kesehatan, perusahaan air, dan perusahaan listrik. Lalu pada Oktober di Manama, para pejabat Bahrain dan Israel menandatangani beberapa MOU kerjasama terkait sektor perdagangan, layanan udara, telekomunikasi, perbankan serta pertanian.³⁵

³⁴ Tempo, "Uni Emirat Arab Resmikan Kantor Kedutaan Besar di Israel", melalui <https://dunia.tempo.co/read/1483214/uni-emirat-arab-resmikan-kantor-kedutaan-besar-di-israel> (diakses pada 10 Juni 2022)

³⁵ CNN Indonesia, "Israel Resmikan Kedutaan di Bahrain", melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210930192108-120-701747/israel-resmikan-kedutaan-besar-di-bahrain> (diakses pada 10 Juni 2022)

Pada 10 Oktober 2021, perjanjian bebas visa antara Israel dan UEA telah berlaku. Dalam perjanjian ini mengatur perjalanan antara Israel dan UEA yang bisa dilakukan tanpa visa. Menteri Dalam Negeri Israel tiba di UEA untuk berbicara dengan pejabat UEA. Terkait hal ini, UEA merupakan negara teluk yang pertama kali menandatangani perjanjian bebas visa dengan Israel.³⁶

Kerjasama Pertahanan Antara Israel Dengan UEA-Bahrain

Israel yang unggul dalam militer dan pertahanan karena canggihnya sistem pertahanan dan keamanan siber yang mereka miliki merupakan salah satu daya tarik besar bagi negara yang beraliansi dengannya. Alat-alat canggih yang meliputi pesawat tak berawak atau *drone*, pertahanan rudal, sistem elektronik dan integrasi sistem. Beberapa produk keamanan siber telah dijual Israel kepada UEA.³⁷

Pada 11 November 2021 pasukan militer angkatan laut UEA, Bahrain, Israel dan Komando Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat (NAVCENT) memulai latihan bersama terkait operasi keamanan maritim multilateral di Laut Merah. Dan ini merupakan latihan angkatan laut pertama yang diakui secara resmi ke public antara Amerika,

³⁶ AA, "Perjanjian Bebas Visa Israel-UEA Berlaku 10 Oktober", melalui <https://www.aa.com.tr/id/dunia/perjanjian-bebas-visa-israel-uea-berlaku-10-oktober/2383950> (diakses pada 10 Juni 2022)

³⁷ Lisa Barrington, "UAE, Israeli ministers pledge defence cooperation", melalui <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-defence-idUSKBN25L1XP> (diakses pada 5 Juni 2022)

Israel beserta dua negara Teluk. Latihan ini berlangsung secara 5 hari termasuk pelatihan di kapal USS Portland dengan harapan sebagai strategi perlindungan dari ancaman kekuatan Iran di wilayah Teluk.³⁸

Pada 18 November 2021 Israel dan Uni Emirat Arab sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang militer, dua negara ini melakukan pengembangan kapal tanpa awak yang dapat digunakan untuk keperluan militer. Seminggu sebelum ini militer kedua negara ini telah mengadakan latihan angkatan laut. *Israel Aerospace Industries* dan *EDGE* yaitu grup pembuat senjata UEA mengumumkan bahwa akan menjadi mitra dalam hal ini dinyatakan juga bahwa kedua perusahaan ini merancang seri 170 m-USV (*modular-unmanned surface vessel*) untuk penggunaan militer. Kapal ini dapat digunakan dari jarak jauh dan diharapkan dapat berguna untuk operasi keamanan maritime, pengawasan, pendeteksi dan penangkalan kapal selam atau ranjau, pengumpulan intelijen dan juga platform untuk lepas landas vertical juga pesawat seperti helikopter serta *drone*.³⁹

Pada 3 Februari 2022 Bahrain dan Israel menandatangani perjanjian kerjasama bidang keamanan dan hal

ini merupakan pakta pertama kali yang terjadi antara Israel dengan negara Teluk. Perjanjian ini dilengkapi dengan adanya MOU (*memorandum of understanding*) berisi poin-poin kerjasama di bidang intelijen, militer ke militer, kolaborasi industri dan masih banyak lagi kerjasama di bidang ini. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz yang hadir langsung pada pertemuan di Bahrain ini menyatakan “Tidak terhitung lama setelah penandatanganan *Abraham Accord*, kami telah mencapai kesepakatan pertahanan yang akan berkontribusi pada keamanan kedua negara dan stabilitas kawasan.”⁴⁰

Masih di bulan yang sama Februari 2022, Bahrain mengkonfirmasi bahwa akan ada perwira angkatan laut Israel yang ditempatkan di Bahrain sekaligus menjadi perwira militer Israel yang pertama kalinya ditempatkan di negara Teluk. Kementerian Luar Negeri Bahrain menyatakan bahwa penempatan perwira Israel tersebut berkaitan dengan pengamanan kebebasan navigasi di perairan teritorial, melindungi perdagangan internasional, dan menghadapi tindakan pembajakan dan terorisme di kawasan navigasi wilayah Bahrain dan hal ini juga bermula dari kecurigaan negara-negara teluk terhadap Iran termasuk Bahrain terhadap ancaman keamanan navigasi laut di kawasan namun Teheran membantah tuduhan tersebut. Sehari sebelum pernyataan

38 Reuters, “*UAE, Bahrain, Israel and U.S. forces in first joint naval drill*”, melalui <https://www.reuters.com/world/middle-east/uae-bahrain-israel-us-forces-conduct-red-sea-military-exercise-2021-11-11/> (diakses pada 5 Juni 2022)

39 Ahmad Islami, “*UEA dan Israel Kerjasama Kapal Perang Tak Berawak Canggih*”, melalui <https://www.inews.id/news/internasional/uea-dan-israel-kerja-sama-bikin-kapal-perang-tak-berawak-canggih> (diakses pada 5 Juni 2022)

40 Reuters, “*Israel defence minister signs security agreement with Bahrain*”, melalui <https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-defence-minister-visits-us-navy-base-bahrain-2022-02-03/> (diakses pada 5 Juni 2022)

resmi dari kemenlu Bahrain, terdapat laporan media yang mengungkapkan bahwa seorang perwira Israel yang ditempatkan di Bahrain bertugas sebagai perwira penghubung untuk Armada Kelima Amerika Serikat.⁴¹

Pada Juli 2022, Israel telah menyetujui untuk menjual pesawat tak berawak dan sistem *anti-drone* kepada Bahrain. Serta terdapat laporan dari Wall Street Journal yang mengutip penuturan seorang pejabat senior Bahrain yang mengungkapkan bahwa Mossad dan Shin Bet telah bekerja dengan Manama dalam beberapa bulan terakhir untuk melatih petugas intelijennya. Info terkait penjualan drone Israel ke Bahrain juga dikutip dari pejabat yang sama namun dari laporan itu tidak rinci menjelaskan jenis *drone* atau peralatan militer apa akan masuk dalam kesepakatan Israel-Bahrain ini.⁴²

Optimalisasi Kerjasama Ekonomi Israel Dengan UEA-Bahrain

Pada 31 Mei 2022 Israel telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Emirat Arab yang merupakan perjanjian perdagangan besar pertama dengan negara Arab yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara

Timur Tengah. Perjanjian tersebut ditandatangani di Dubai oleh Menteri Ekonomi dan Industri Israel Orna Barbivai dan rekannya, Menteri Ekonomi UEA Abdulla bin Touq al-Marri. Presiden Dewan Bisnis UEA-Israel Dorian Barak mengatakan perjanjian perdagangan ini meliputi penetapan tarif pajak, impor dan kekayaan intelektual, yang akan mendorong lebih banyak perusahaan Israel untuk mendirikan kantor di UEA, khususnya di Dubai. Dewan memperkirakan akan ada hampir 1.000 perusahaan Israel yang bekerja di atau melalui UEA pada akhir tahun serta melakukan bisnis dengan Asia Selatan, Timur Jauh dan Timur Tengah.

Menjelang penandatanganan, kementerian ekonomi Israel mengatakan kesepakatan itu akan menghapus tarif atas 96% barang, termasuk makanan, pertanian, kosmetik, peralatan medis, dan obat-obatan. UEA memperkirakan bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif ini akan meningkatkan perdagangan bilateral menjadi lebih dari \$10 miliar per tahun dalam waktu lima tahun.⁴³

Israel dan Bahrain juga telah menyepakati kerangka kerja sama ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan hubungan ekonomi dan mendorong pergerakan bebas barang dan jasa antar negara. Disebutkan juga bahwa mereka bermaksud untuk mendorong kerjasama sektor swasta, bekerja sama dalam hal standarisasi dan regulasi, mendorong proyek-proyek R&D bersama, mengadakan seminar

⁴¹ Aljazeera, "Bahrain confirms Israeli officer to be stationed in the country", melalui <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/12/bahrain-confirms-israeli-officer-to-be-stationed-in-the-country> (diakses pada 5 Juni 2022)

⁴² Middle East Monitor, "Israel sells drones, anti-drone system to Bahrain", melalui <https://www.middleeastmonitor.com/20220713-israel-sells-drones-anti-drone-system-to-bahrain/> (diakses pada 9 Juni 2022)

⁴³ Aljazeera, "Israel signs first Arab free trade agreement with UAE" melalui <https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/31/israel-signs-major-trade-deal-with-uae> (diakses pada 15 Juni 2022)

bisnis dan profesional bersama dan bertukar keahlian dan pengetahuan di berbagai bidang. Perjanjian tersebut juga akan membentuk komite ekonomi bersama untuk mempromosikan pelaksanaan perjanjian dan memeriksa cara-cara untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. Kementerian Ekonomi dan Industri akan terus bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempromosikan kepentingan ekonomi Negara Israel, untuk meningkatkan ekspor Israel ke pasar Bahrain, untuk menarik investasi dari Bahrain ke Israel dan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, dalam rangka untuk memungkinkan semakin banyak perusahaan Israel masuk ke pasar Teluk Arab dan ruang internasional.⁴⁴

Kerjasama sektor ekonomi juga berlanjut antara dua Bank besar Israel yaitu Bank Leumi dan Bank Hapoalim yang telah menandatangani MOU kerjasama dengan Bank Nasional Uni Emirat Arab yaitu *First Abu Dhabi Bank* dan *Emirates National Bank*. Bank Leumi menyatakan bahwa kesepakatan ini memungkinkan negara-negara untuk menerapkan kerjasama ekonomi. Sebelum terjadinya normalisasi, Bank Leumi menyatakan bahwa terdapat beberapa klien yang ingin mentransfer dana ke dan dari UEA namun karena belum adanya hubungan diplomatik resmi mereka harus melakukan transaksi ini melalui bank-bank Eropa sebagai

perantara. Dalam MOU yang ditandatangani, bank-bank ini siap untuk terus meningkatkan hubungan dengan lembaga keuangan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dengan menyediakan layanan transaksi seperti kredit, perdagangan mata uang asing serta berbagai layanan lainnya. Bank Leumi yang memiliki anak perusahaan seperti *Leumi Partners* dan *Leumi Tech* menyatakan akan membantu menjalin kerjasama antara perusahaan Israel dengan investor UEA terkait dana kekayaan.⁴⁵

Dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Bank Hapoalim dan Bank Leumi milik Israel dengan Bank Nasional Bahrain terkait kerjasama antara pemberi pinjaman. Bank Hapoalim menyatakan dengan adanya kesepakatan ini maka akan memungkinkan pelanggan kedua bank untuk terlibat dalam transaksi dan transaksi perbankan antara pihak-pihak di Israel dan Bahrain karena ikatan ekonomi yang semakin erat. Bank Leumi turut memberi pernyataan bahwa kesepakatan ini akan "meletakkan infrastruktur" untuk hubungan ekonomi antara kedua negara, memungkinkan investasi, perdagangan, layanan kliring, dan perdagangan valuta asing dan sekuritas. Bank Nasional Bahrain, terdaftar secara publik di bursa Bahrain, didirikan pada tahun 1957 sebagai bank milik lokal pertama Kerajaan. Ini memiliki 29 cabang dan beroperasi di Bahrain,

⁴⁴ Zev Stub, "Israel, Bahrain to sign economic cooperation agreement" melalui <https://www.jpost.com/middle-east/israel-bahrain-to-sign-economic-cooperation-agreement-675033> (diakses pada 15 Juni 2022)

⁴⁵ Reuters, "Israel's Leumi signs deals with First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD" melalui <https://www.reuters.com/article/israel-emirates-bankruptcy-int-idUSKBN2661ZZ> (diakses pada 15 Juni 2022)

UEA dan Arab Saudi, menurut situs webnya.⁴⁶

Pada sektor penerbangan, pada 26 November 2020 terjadinya penerbangan pesawat Uni Emirat Arab menuju kota Tel Aviv, Israel. Hal ini menjadi momen bersejarah dikarenakan penerbangan ini merupakan penerbangan komersial yang pertama antara UEA dan Israel. Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan selaku Presiden UEA menyatakan harapannya agar normalisasi dengan Israel ini dapat menyokong kemajuan dan kemakmuran di Timur Tengah.⁴⁷

Setelahnya terjadi penerbangan komersial Israel Pesawat "El Al" terbang dari Tel Aviv ke Abu Dhabi membawa delegasi AS dan Israel. Di badan pesawat "El Al" yang membawa delegasi AS dan Israel itu terpampang tulisan "Perdamaian" dalam bahasa Inggris, Ibrani dan Bahasa Arab. Pesawat penerbangan komersial dengan nomor penerbangan El Al 971 itu lepas landas sekitar pukul 11.20 dari Tel Aviv menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Penerbangan ini menandai langkah

normalisasi hubungan diplomatik Israel-UEA yang telah disepakati.⁴⁸

Dilanjutkan dengan penerbangan komersial pertama antara Bahrain dan Israel yang mendarat pada Kamis 30 September 2021 di bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv, setahun setelah normalisasi hubungan antara kedua negara tersebut. Penerbangan Gulf Air GF972 mendarat di bandara utama Israel. Penerbangan tersebut memulai rute reguler baru Tel Aviv-Manama yang akan mencakup dua penerbangan mingguan di setiap arah, pada hari Senin dan Kamis. Harga mulai dari \$199 termasuk bagasi. Penerbangan antara Manama dan Tel Aviv akan dioperasikan dua kali seminggu pada hari Senin dan Kamis, menurut pernyataan oleh Kementerian Transportasi Israel. Perjalanan dari Bahrain ke Israel akan memakan waktu dua jam 50 menit, dan dua jam 35 menit untuk perjalanan pulang. Selama upacara yang diadakan di Bandara Ben Gurion, Wakil Menteri Luar Negeri Israel Idan Roll mengatakan bahwa rute baru akan "memungkinkan warga kedua negara untuk bekerja sama dan mengembangkan kolaborasi ilmiah, budaya dan bisnis."⁴⁹

⁴⁶ Shoshanna Solomon, "Israeli lenders Hapoalim and Leumi sign accords with National Bank of Bahrain" melalui <https://www.timesofisrael.com/israeli-lenders-hapoalim-and-leumi-sign-accords-with-national-bank-of-bahrain/> (diakses pada 15 Juni 2022)

⁴⁷ Julkifli Sinuhaji, "Pertama Kali Penerbangan dari UEA ke Israel" melalui <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011018948/pertama-kali-penerbangan-dari-uea-ke-israel-pm-netanyahu-assalamualaikum> (diakses pada 15 Juni 2022)

⁴⁸ DW, "Pesawat Komersial Israel Pertama Kali

Mendarat di UEA" melalui <https://www.dw.com/id/pesawat-komersial-israel-el-al-pertama-kali-mendarat-di-uea/a-54769537> (diakses pada 15 Juni 2022)

⁴⁹ Lazar Berman, "First commercial flight between Israel and Bahrain lands at Ben Gurion Airport", melalui <https://www.timesofisrael.com/first-commercial-flight-between-israel-and-bahrain-lands-at-ben-gurion-airport/> (diakses pada 15 Juni 2022)

Pada sektor ekspor-impor antara Israel dan Bahrain dimulai pada tahun 2020 dimana Israel mengekspor \$72rb ke Bahrain. Produk utama yang diekspor dari Israel ke Bahrain adalah Produk Kecantikan (\$44rb), Instrumen Medis (\$15rb), dan Perhiasan (\$10rb). Selama 19 tahun terakhir, ekspor Israel ke Bahrain telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 25,2%, dari \$1rb pada tahun 2001 menjadi \$72rb pada tahun 2020. Bahrain juga mengekspor \$16rb ke Israel. Produk utama yang diekspor dari Bahrain ke Israel adalah Perhiasan (\$9rb), Furnitur (\$3,96rb), dan Alas Kaki Kulit (\$2rb). Selama 19 tahun terakhir, ekspor Bahrain ke Israel telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 6,47%, dari \$4,85rb pada tahun 2001 menjadi \$16rb pada tahun 2020. Selama tahun 2020, Israel memiliki perdagangan bersih yang besar dengan Bahrain dalam ekspor Produk Kimia (\$44rb), Instrumen (\$15rb), dan Logam Mulia (\$11rb). Sementara Bahrain memiliki perdagangan bersih yang besar dengan Israel dalam ekspor Logam Mulia (\$9rb), Aneka (\$3,96rb), dan Alas Kaki dan Hiasan Kepala (\$2rb).⁵⁰

Ekspor-impor juga terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab yaitu pada tahun yang sama Israel mengekspor \$58,8 juta ke Uni Emirat Arab. Produk utama yang diekspor Israel ke Uni Emirat Arab adalah Berlian (\$ 43,6 juta), Telepon (\$ 3,63 juta), dan Turbin Gas (\$ 1,68 juta). Selama 25 tahun terakhir, ekspor

Israel ke Uni Emirat Arab telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 23,4%, dari \$308rb pada tahun 1995 menjadi \$58,8 juta pada tahun 2020. Pada tahun 2007, Israel mengekspor jasa ke Uni Emirat Arab senilai \$1 juta, dengan jasa Personal, budaya, dan rekreasi (\$1M) dan jasa Konstruksi (\$2rb). Uni Emirat Arab juga mengekspor \$120 juta ke Israel. Produk utama yang diekspor Uni Emirat Arab ke Israel adalah Berlian (\$39,5 juta), Peralatan Penyiaran (\$26,2 juta), dan Biji Berminyak Lainnya (\$11,5 juta). Selama 25 tahun terakhir, ekspor Uni Emirat Arab ke Israel telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 33,9%, dari \$81,1rb pada tahun 1995 menjadi \$120 juta pada tahun 2020. Selama tahun 2020, Israel memiliki perdagangan bersih yang besar dengan Uni Emirat Arab dalam ekspor Logam Mulia (\$43,8 juta), Mesin (\$11,4 juta), dan Produk Nabati (\$1,15 juta). Selama tahun 2020, Uni Emirat Arab memiliki perdagangan bersih yang besar dengan Israel dalam ekspor Logam Mulia (\$39,9 juta), Mesin (\$35,2 juta), dan Produk Nabati (\$20,3 juta).⁵¹

KESIMPULAN

Gagasan Israel dalam merealisasikan normalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab tampaknya membuahkan hasil dibuktikan dengan tercapainya kesepakatan *Abraham Accords* yang menyatakan resminya hubungan diplomatik antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain dan juga meliputi poin-poin kerjasama.

⁵⁰ OEC, “*Bilateral Trade by Products*”, melalui <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/isr/partner/bhr> (diakses pada 15 Juni 2022)

⁵¹ OEC, “*Bilateral Trade by Products*”, melalui <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/isr/partner/are> (diakses pada 15 Juni 2022)

Kesepakatan ini merupakan bukti rasionalitas mereka dalam menjadi realistis dan mengejar kepentingan nasional mereka. Terjadinya normalisasi ini dapat dikatakan berperan besar dalam perubahan manuver politik Timur Tengah dan substansi yang mencakup semua aspek. Normalisasi ini bisa menjadi referensi bagi banyak negara untuk mencapai perdamaian dan stabilitas kawasan.

Bisa dikatakan bahwa perjanjian perdamaian antara Israel dengan UEA dan Bahrain ini lebih mengutamakan keamanan. Dalam kesepakatan ini tidak ada poin yang menyatakan adanya hubungan atau sangkut paut dengan agama karena para penandatangan perjanjian ini bertujuan menjalin kerjasama politik, ekonomi, keamanan dan beberapa sektor penunjang kemajuan negara mereka. Isu Israel-Palestina tidak lagi menjadi prioritas utama dalam perpolitikan Timur Tengah melainkan ada urgensi yang harus dihadapi yaitu ancaman kekuatan Iran. Iran yang secara geografis berada di Timur Tengah dengan kekuatan nuklir yang dimilikinya, populasi dan ukurannya yang besar serta perbedaan ideologinya dianggap dapat mengganggu keamanan dan stabilitas kawasan. Terdapat lima wilayah yang terhubung dengan Iran.

UEA dan Bahrain dengan yakin menandatangani perjanjian *Abraham Accords* karena memang dua negara ini tidak pernah berkonfrontasi langsung dengan Israel terkait konflik apapun. Kedua negara ini mengambil sikap netral dalam memandang isu Israel-Palestina ini. Negara-negara GCC pun mulai mengubah proritas mereka berdasarkan realitas yang terjadi di

kawasan Timur Tengah. Iran dengan terang-terangan memandang Israel sebagai musuh serta menyatakan untuk tak segan-segan memerangi Israel dengan nuklir yang dimilikinya. Sehingga ancaman kekuatan Iran ini menyebabkan terbentuknya aliansi baru yaitu Israel dengan UEA dan Bahrain dengan dukungan Amerika Serikat.

Sebagai kesimpulan, terkait normalisasi hubungan UEA dan Bahrain dengan Israel terdapat dua temuan, yaitu: (1) adanya kepentingan nasional UEA Bahrain serta Israel, yang meliputi kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi, dan (2) adanya dua jenis respons dari berbagai negara, khususnya dari negara-negara Muslim, yakni respons positif dan negatif.

Pertama, terkait kepentingan politik dalam normalisasi ini, lebih banyak dipengaruhi oleh posisinya di poros kekuasaan politik. Di bidang keamanan, UEA dan Bahrain yang memiliki persepsi adanya ancaman dari pihak Iran, merasa perlu menjalin kerja sama keamanan, terutama pembelian senjata, dengan Israel yang dikenal memiliki keunggulan teknologi dan industri militer. UEA dan Bahrain mengkhawatirkan pengaruh Iran akan terus meluas hingga ke kawasan Teluk Arab. Negara-negara kecil seperti UEA dan Bahrain dalam memperkuat kemananan nasionalnya perlu untuk membentuk aliansi, meningkatkan kemampuan militer, dan terlibat dalam kerja sama dengan negara lainnya.

Di bidang ekonomi secara umum dapat dikatakan bahwa Israel memiliki kepentingan yang lebih besar. Bahrain dan UEA juga melihat kerja sama ekonomi dengan Israel

dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang melemah akibat pandemi COVID-19 dan anjloknya harga minyak mentah dunia, serta sebagai upaya untuk diversifikasi pendapatan negara.

Kedua, mengenai perbedaan respons dari berbagai negara, khususnya negaranegara Muslim. Sebagian negara Muslim merespons dengan positif, seperti Mesir, Yordania, Bahrain, dan Sudan. Alasan negara-negara ini adalah karena menghargai upaya UEA dan Bahrain juga Israel untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas di wilayah Timur Tengah. Pemerintah UEA dan Bahrain pun menyatakan masih konsisten mendukung Palestina dengan solusi dua negara dan menyatakan bahwa normalisasi ini sebagai upaya negaranya untuk menahan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel.

Di sisi lain, beberapa negara seperti Iran, Qatar, Turki, Aljazair, dan Palestina sendiri merespons dengan negatif. Sebagai tanggapan atas normalisasi ini, mereka mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memperkuat dukungan terhadap Palestina secara finansial dan memperkuat keamanan mereka. Bentuk lain atas ketidaksetujuan ini di antaranya juga disampaikan melalui pernyataan resmi negara. Di beberapa negara juga ditemukan aksi protes dari masyarakat sipil, aktivis, dan akademisi untuk menentang normalisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Julkifli Sinuhaji, "Pertama Kali Penerbangan dari UEA ke Israel" melalui <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011018948/pertama-kali-penerbangan-dari-uea-ke-israel-pm-netanyahu-assalamualaikum>

DW, "Pesawat Komersial Israel Pertama Kali Mendarat di UEA" melalui <https://www.dw.com/id/pesawat-komersial-israel-el-al-pertama-kali-mendarat-di-uea/a-54769537>

Lazar Berman, "First commercial flight between Israel and Bahrain lands at Ben Gurion Airport", melalui <https://www.timesofisrael.com/first-commercial-flight-between-israel-and-bahrain-lands-at-ben-gurion-airport/>

OECD, "Bilateral Trade by Products", melalui <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/isr/partner/bhr>

OECD, "Bilateral Trade by Products", melalui <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/isr/partner/are>

Zev Stub, "Israel, Bahrain to sign economic cooperation agreement" melalui <https://www.jpost.com/middle-east/israel-bahrain-to-sign-economic-cooperation-agreement-675033>

Reuters, "Israel's Leumi signs deals with First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD" melalui <https://www.reuters.com/article/israel-emirates-bankruptcy-int-idUSKBN2661ZZ>

Shoshanna Solomon, "Israeli lenders Hapoalim and Leumi sign accords with National Bank of Bahrain" melalui <https://www.timesofisrael.com/israeli-lenders-hapoalim-and-leumi-sign-accords-with-national-bank-of-bahrain/>

Middle East Monitor, "Israel sells drones, anti-drone system to Bahrain", melalui <https://www.middleeastmonitor.com/20220713-israel-sells-drones-anti-drone-system-to-bahrain/>

Aljazeera, "Israel signs first Arab free trade agreement with UAE" melalui <https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/31/israel-signs-major-trade-deal-with-uae>

Reuters, “*Israel defence minister signs security agreement with Bahrain*”, melalui <https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-defence-minister-visits-us-navy-base-bahrain-2022-02-03/>

Aljazeera, “*Bahrain confirms Israeli officer to be stationed in the country*”, melalui <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/12/bahrain-confirms-israeli-officer-to-be-stationed-in-the-country>

Ahmad Islami, “*UEA dan Israel Kerjasama Kapal Perang Tak Berawak Canggih*”, melalui <https://www.inews.id/news/internasional/uea-dan-israel-kerja-sama-bikin-kapal-perang-tak-berawak-canggih>

CNN Indonesia, “*Israel Resmikan Kedutaan di Bahrain*”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210930192108-120-701747/israel-resmikan-kedutaan-besar-di-bahrain>

AA, “*Perjanjian Bebas Visa Israel-UEA Berlaku 10 Oktober*”, melalui <https://www.aa.com.tr/id/dunia/perjanjian-bebas-visa-israel-uea-berlaku-10-oktober/2383950>

Lisa Barrington, “*UAE, Israeli ministers pledge defence cooperation*”, melalui <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-defence-idUSKBN25L1XP>

Reuters, “*UAE, Bahrain, Israel and U.S. forces in first joint naval drill*”, melalui <https://www.reuters.com/world/middle-east/uae-bahrain-israel-us-forces-conduct-red-sea-military-exercise-2021-11-11/>

Suci Sekarwati, “*Kaleidoskop 2020: Ramai-ramai Normalisasi Hubungan Israel*” melalui <https://dunia.tempo.co/read/1415163/kaleidoskop-2020-ramai-ramai-normalisasi-hubungan-israel>

VOA Indonesia, “*Israel Resmi Buka Kedutaan Besar di Uni Emirat Arab*”, melalui <https://www.voaindonesia.com/a/israel->

[resmi-buka-kedutaan-besar-di-uni-emirat-arab/5947310.html](https://www.voaindonesia.com/a/israel-resmi-buka-kedutaan-besar-di-uni-emirat-arab/5947310.html)

Tempo, “*Uni Emirat Arab Resmikan Kantor Kedutaan Besar di Israel*”, melalui <https://dunia.tempo.co/read/1483214/uni-emirat-arab-resmikan-kantor-kedutaan-besar-di-israel>

Reuters, “*Egypt's Sisi welcomes UAE-Israel deal, halt to annexation of Palestinian lands*” melalui <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-egypt-idUSKCN2592SX>

BBC, “*Agreement between Israel and the UAE ;Major General Bagheri: We will not tolerate Iran's national security being compromised*” melalui <https://www.bbc.com/persian/iran-53797243>

Rossi Handayani, “*Palestina Pilih Mundur dari Kepresidenan Liga Arab*”, melalui <https://www.republika.co.id/berita/qh3aw1430/palestina-pilih-mundur-dari-kepresidenan-liga-arab>

Victor, Simela M., “*Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel dan Isu Palestina*”, (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 2020, Vol. 12, No.17). hal 8

The Arab Gulf States Institute in Washington, “*Turbulent Skies for Gulf F-35 Deals*”, melalui <https://agsiw.org/turbulent-skies-for-gulf-f-35-deals/>

Kelsey Davenport, “*IAEA Investigations of Iran's Nuclear Activities*” melalui <https://www.armscontrol.org/factsheets/iaea-investigations-irans-nuclear-activities>

Steve Holland, “*Israel sign joint pledge to deny Iran nuclear weaponry*” melalui <https://www.reuters.com/world/us-israel-sign-joint-pledge-denying-nuclear-weapon-iran-2022-07-14/>

Lisa Barrington, “*UAE-Israel phone lines open to normalize ties*”, melalui <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-telecoms-idUSKCN25C0DB>

Barry Buzan, “*People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in*

- the Post-Cold War Era. 2 nd edition*”(London: Harvester Wheatsheaf) hal 190
- Huma Baqai & Sabiha Mehreen, “*Abraham Accords: A Journey From Arab-Israeli to Palestinian-Israeli Conflict*”, (JISR-MMSE 2021 Vol 19 No 1), hal 118
- Ariel Levite, “*Deciphering Iran’s Nuclear Strategy*”, melalui <https://carnegieendowment.org/2021/09/10/deciphering-iran-s-nuclear-strategy-pub-85313>
- Habib Al Mulla, Borys Dackiw & Samir Safar, “*With New Decree, UAE Abolishes Israel Boycott Law Following the Historic UEA-Israel Peace Deal*,” Middle East Insight, melalui <https://meinsights.bakermckenzie.com/2020/09/03/with-new-decree-uae-abolishes-israel-boycott-law-followingthe-historic-uae-israel-peace-deal/>
- Nancy Truck, “*The Arab Boycott of Israel*,” (Foreign Affairs 55 no 3, Council on Foreign Relations, April 1977) hal. 473-474
- Azra Azyumardi, “*Konflik Baru Antar Peradaban, Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persanda, 2002)
- Michael J Cohen, “*Britain's Moment in Palestine: Retrospect and Perspectives, 1917-1948*”, (Israeli History, Politics and Society, 2014) hal 146
- Wong A, “*Jejak Konflik Israel-Arab hingga Berujung Aksi Normalisasi*”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200916163507-120-547305/jejak-konflik-israel-arab-hingga-berujung-aksi-normalisasi>
- Asgar Bixby, “*Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia*”, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1993) hal 22
- Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (New York: Deakin University, 2005) hal 35.
- Jerome Slater, “*What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process*”, (Political Science Quarterly, 2001) hal. 171-172
- Barry Buzan, “*People, States and Fear*”, (Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1991 and 2008 with a new preface from the author) hal 187.
- Stephen Mcglinchey, Rosie Walters & Christian Scheinpflug, *International Relations Theory* (Bristol, England : E-International Relations, 2017), hal 21.
- M. Cox & R. Campanaro, *Introduction To International Relations* (University of London, 2016), hal 105.
- Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional: Perspektif – Perspektif Klasik*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2016) hal 39.
- Scott Burchill, Andrew Linklater, *Theories of International Relations* (New York: Deakin University 1995, 1996) hal 32.
- US Embassy in Israel, “*Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates*”, August 2020, melalui <http://il.usembassy.gov/joint-statement-of-the-united-states-the-state-of-israel-and-the-united-arab-emirates/>
- Haaretz, “*Historic Diplomatic Breakthrough*”, melalui <https://www.haaretz.com/israel-news/historic-diplomatic-breakthrough-read-the-full-statement-on-israel-uae-agreement-1.9070792>
- The National News, “*Joint statement of US, Israel and UAE*”, melalui <https://www.thenationalnews.com/world/gcc/full-text-joint-statement-of-us-israel-and-uae-1.1063399>
- Rabi, U. & Mueller, C. (2017), “*The Gulf Arab States and Israel since 1967: From ‘No Negotiation’ to Tacit Cooperation*”, British Journal of Middle East Studies, 44(4), 576592.

Anadolu Agency, "*Bahrain in the context of normalization with Israel*", melalui <https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-bahrain-in-the-context-of-normalization-with-israel/1955293>

US Department of State, "*The Abraham Accords*", melalui <https://www.state.gov/the-abraham-accords/>